

Penerapan Patriotisme Dalam Perspektif Hukum (Studi Kasus Pada Sanggar Tari Puspa Dewi Surabaya)

Tomy Michael, Syofyan Hadi, Wiwik Afifah, Fransiscus Nanga Roka, Muhamad Khoirul Ma'arif, Anam Iman Aulia, Zidniy Ma Naviah, Alienda Maulidiantie

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

E-mail: tomy@untag-sby.ac.id, syofyan@untag-sby.ac.id, wiwikafifah@untag-sby.ac.id; 1322400023@surel.untag-sby.ac.id; khoirul_arif@untag-sby.ac.id; anam@surel.untag-sby.ac.id; 1312400018@surel.untag-sby.ac.id; aliendamaulidiantie@surel.untag-sby.ac.id

Article History:

Received: 29 April 2025

Revised: 10 Juni 2025

Accepted: 16 Juni 2025

Keywords: hukum; keapstian hukum; patriotisme; penari anak

Abstract: Dalam konteks ilmu hukum, sesuatu yang tidak diketahui harus ditelusuri secara normatif. Dalam tulisan ini berfokus menyelesaikan permasalahan akan makna patriotisme dalam Sanggar Tari Puspa Dewi Surabaya karena dalam praktiknya para penari anak hanya melakukan tarian secara global namun kurang mengetahui makna kebudayaan dalam ilmu hukum. Frasa “kurang mengetahui” yaitu peningkatan akan korelasi tarian dengan ilmu hukum. Metode yang digunakan adalah menggunakan penelitian empiris dengan pengumpulan data berupa wawancara, pelatihan dan pengolahan data lebih lanjut. Penyelesaian masalah pertama yaitu dengan mengadakan permainan ular tangga patriotisme dimana adanya permainan yang menggunakan daftar pertanyaan seputar pemahaman patriotisme. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa penari anak pada Sanggar Tari Puspa Dewi Surabaya merupakan bagian tidak terpisahkan sebagai subjek hukum yang menjunjung tinggi patriotisme dalam tari.

PENDAHULUAN

Dalam konteks ilmu hukum, sesuatu yang tidak diketahui harus ditelusuri secara normatif. Dalam tulisan ini berfokus menyelesaikan permasalahan akan makna patriotisme dalam Sanggar Tari Puspa Dewi Surabaya karena dalam praktiknya para penari anak hanya melakukan tarian secara global namun kurang mengetahui makna kebudayaan dalam ilmu hukum. Frasa “kurang mengetahui” yaitu peningkatan akan korelasi tarian dengan ilmu hukum. Mengacu Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (PP No. 87-2021) termaktub bahwa upaya pembangunan karakter bangsa membutuhkan kerja keras yang persisten dan konsisten, agar mampu mewujudkan bangsa yang berkarakter, maju, berdaya saing, dan mewujudkan bangsa Indonesia yang bangga terhadap identitas nasional. Dalam mewujudkan amanat tersebut, bangsa Indonesia memerlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan untuk menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia. (Rahmatullah & Michael, 2024) Langkah strategis dalam

memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia dilakukan melalui Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Langkah strategis tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sebagai beban biaya. Konsep demikian selaras bahwa kebudayaan adalah bagian dari suatu bangsa yang harus tetap dijaga. Namun eprubahan juga dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi sehingga terjadi perubahan respons dari ketidakpastian dan ketidakstabilan politik. (Ben Othman et al., 2024) Korelasinya yaitu menjadikan banyak orang berfokus pada apa yang ingin diketahuinya daripada mengembangkan diri sendiri.(Pena et al., 2025)

Dengan demikian akan menunjukkan perubahan yang signifikan. Hubungan antara hukum dan sastra dapat dilihat berdasarkan contoh fitur yang menjadi ciri khas karya fiksi ilmiah dan, pada saat yang sama, penting dalam refleksi ilmu hukum. Kemungkinan hubungan antara hukum dan sastra fiksi ilmiah telah dicatat. (Andruszkiewicz, 2022) Pengambilan korelasi dengan sastra dikarenakan ada kesamaan sastra dan kesenian dalam satu rumpun yang sama.

Berdasarkan pendahuluan diatas, memunculkan pertanyaan bagaimana cara menerapkan patriotisme di Sanggar Tari Puspa Dewi Surabaya?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah menggunakan penelitian empiris dengan pengumpulan data berupa wawancara, pelatihan dan pengolahan data lebih lanjut. Secara empiris tetap melakukan perbandingan dengan peraturan perundang-undangan yang ada kemudian dilakukan analisa tekstual dan perbandingan dengan keadaan empiris.(Rahmatullah & Michael, 2024) Penggunaan metode ini memperkuat cara yang tepat menerapkan patriotisme di Sanggar Tari Puspa Dewi Surabaya sehingga memunculkan kepastian hukum. Selain itu, pendapat penulis digabungkan dengan pengalaman dalam mempelajari ilmu hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.(Sputra & Michael, 2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengacu pada Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah (Perda Jatim No. 6-2024) termaktub bahwa setiap orang berhak menumbuhkembangkan nilai, norma, adat istiadat, dan kesenian untuk meningkatkan taraf kehidupannya; berpikir, berekspresi, dan berkreasi dalam melestarikan dan membangun kebudayaannya; mengelola nilai, norma, adat istiadat, dan kesenian yang menjadi identitas etniknya sebagai satu kesatuan pembangunan kebudayaan Indonesia; mengapresiasi kebudayaan Indonesia; dan mengakses data dan informasi mengenai kebudayaan. Selain itu setiap orang wajib mendukung upaya pemajuan kebudayaan; memelihara rasa toleransi dan kebinekaan berkebudayaan; mendorong lahirnya interaksi antarbudaya; mempromosikan kebudayaan baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional; memelihara sarana dan prasarana kebudayaan; dan melakukan pengawasan terhadap upaya pemeliharaan dan pengembangan objek pemajuan kebudayaan. Nur Farida Novia Wardani selaku pemilik Sanggar Tari Puspa Dewi Surabaya mengatakan bahwa peningkatan patriotisme selaras dengan visi misinya karena penari anak adalah generasi emas. Penyelesaian masalah pertama yaitu dengan mengadakan permainan ular tangga patriotisme dimana adanya permainan yang menggunakan daftar pertanyaan seputar pemahaman patriotisme. Pertanyaan yang dibuat antara lain sebutkan 3 negara tetangga Indonesia, sebutkan lambang negara Indonesia, sebutkan rumah ibadah 6 agama dan sebutkan 5 legenda/cerita asal usul suatu daerah. Pertanyaan demikian akan menstimulasi penari anak akan makna patriotisme termasuk pengenalan secara mendalam.



Gambar 1. Ular Tangga Patriotisme

Perempuan dalam kapasitas kepemimpinan akademis tertanam dalam lembaga yang, pada umumnya, diciptakan tanpa masukan mereka. (Michael et al., 2023) Struktur kekuasaan di akademi secara numerik kurang mewakili perempuan dengan ketidakseimbangan gender yang terus berlanjut yang merupakan fenomena global. Sifat gender dari lembaga dan organisasi ini telah menjadi benteng yang terus-menerus mendefinisikan peran gender. (Grunwald & Daroub, 2023) Dalam praktiknya, Sanggar Tari Puspa Dewi Surabaya juga menerima pria sebagai penari anak namun fakta hukum menyajikan penari anak adalah perempuan. Hal ini bukanlah suatu bias gender melainkan adanya faktor penentu dalam pemahaman yang maksimal terkait ilmu hukum. Legitimasi di sini disajikan sebagai hasil penelitian kesadaran hukum empiris yang sepenuhnya mengubah posisi ilmu hukum. Ini bukan analisis sistem hukum tetapi lebih merupakan sumber informasi bagi sistem hukum yang bertujuan untuk mendukung kemampuan beradaptasi dan efektivitasnya dalam masyarakat.(Horák & Lacko, 2019)



Gambar 2. Permainan Ular Tangga Patriotisme

Penyelesaian masalah kedua yaitu memberikan kesimpulan akan permainan dari ular tangga patriotisme sehingga akan menghasilkan efektivitas hukum. Dalam konteks ini, patriotisme sebetulnya tidak bisa dipaksakan melainkan adanya kesadaran akan diri sendiri dan adanya dukungan dari masyarakat sehingga keberlanjutan terus menerus ada.

Berdasarkan latar belakang teori umum di atas, proses transdisipliner terkait dengan sistem aktor (sementara) (atau sistem sosial) yang harus mengembangkan sistem aturan interaksi, perilaku yang sesuai, dan tindakan “lanjut/tidak lanjut” yang berfungsi untuk mencapai tujuan. (Scholz & Renn, 2024) Kelanjutan dalam patriotisme juga selaras dengan pemenuhan hak manusia dan kewajiban manusia. Permasalahan demikian apda akhirnya berofkus pada kepastian sehingga keadilan hukum dan kemanfaatan hukum menjadi terlaksana. (TOMY MICHAEL, 2023)

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa penari anak pada Sanggar Tari Puspa Dewi Surabaya merupakan bagian tidak terpisahkan sebagai subjek hukum yang menjunjung tinggi patriotisme dalam tari. Artinya terjadi perubahan paradigma awam akan perlakuan yang hidup di masyarakat bahwa patriotisme bisa berada dalam tahap apapun. Dengan demikian patriotisme adalah kewajiban siapapun untuk tetap dimaknai karena juga mendukung nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi.

PENGAKUAN

Ucapan terima kasih kepada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas pemberian dana hibah tahun anggaran 2025

DAFTAR REFERENSI

- Andruszkiewicz, M. (2022). Law and Literature – New Tendencies Based on the Example of Science Fiction Motifs. *Białostockie Studia Prawnicze*, 27(4). <https://doi.org/10.15290/bsp.2022.27.04.02>
- Ben Othman, H., Hussainey, K., & Moumen, N. (2024). The influence of cultural tightness–looseness, religiosity, and the institutional environment on tax evasion behaviour: A cross-country study. *European Financial Management*, 30(1), 346–374. <https://doi.org/10.1111/eufm.12420>
- Grunwald, S., & Daroub, S. (2023). A 360° perspective of women in soil science focused on the U.S. In *Frontiers in Soil Science* (Vol. 3). Frontiers Media SA. <https://doi.org/10.3389/fsoil.2023.1072758>
- Horák, F., & Lacko, D. (2019). New contributions of multidisciplinary and empirical approach to legal consciousness. *Lawyer Quarterly*, 9(3), 248–261.
- Michael, T., Rosando, A. F., Anwar, K., Salsabila, F. N., Wahyudi, E., & Purba, F. A. (2023). Memaksimalkan Pariwisata Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Di Wisata Alam Surabaya Dan Kediri. *JHP17*, 8(2), 42–48. <https://doi.org/10.30996/JHP17.V8I2.9226>
- Pena, K., Atas, J., Kemerdekaan, K., Pers, K., Habibie, M. A., & Michael, T. (2025). Ketimpangan Pena Jurnalis atas Kriminalisasi Kemerdekaan dan Kebebasan Pers. *Journal Evidence Of Law*, 4(1), 239–249. <https://doi.org/10.59066/JEL.V4I1.1078>
- Rahmatullah, M. I., & Michael, T. (2024). The Regulation of The Use of Euthanasia In Indonesia and New Zealand In The Framework of International Human Rights. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 2(2), 53–63. <https://doi.org/10.55681/IJSSH.V2I2.1297>
- Scholz, R. W., & Renn, O. (2024). Codes of Conduct for Collaboration as Social Rule Systems for Transdisciplinary Processes. *Systemic Practice and Action Research*, 37(1), 81–101. <https://doi.org/10.1007/s11213-023-09641-3>
- Sputra, Y., & Michael, T. (2025). Limitation of the Authority Constitutional Court in Forming Legal Norms on the Testing of Laws Against the 1945 Constitutional Law of the Republic Indonesia. *Technium Social Sciences Journal*, 68, 263–267. <https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/12445>
- TOMY MICHAEL. (2023). LEGAL EDUCATION - AN EDUCATION OF RECURRING LEGAL NEEDS OR HABITS? *Russian Law Journal*, 11(3). <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1241>